

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PEMERINTAH KECAMATAN MOOTILANGO DALAM PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN GORONTALO

Disusun oleh:

AJON LUKUM

NIM: S2118050

SKRIPSI

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA SOSPOL
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO**

2022

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANTU
PEMERINTAH KECAMATAN MOOTILANGO DALAM
PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN GORONTALO**

Oleh:

AJON LUKUM

S2118050

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Telah disetujui dan diseminarkan,
Gorontalo, - - 2022

Menyetujui,

Pembimbing I



Ripan Paputungan, S.IP., MA
NIDN: 0930097001

Pembimbing II



Novalliansyah Abdussamad, S.IP., MA
NIDN: 0905118602

**Mengetahui
Ketua Program Studi,**



Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN: 0924076701

LEMBAR PENGESAHAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PEMERINTAH KECAMATAN MOOTILANGO DALAM PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN GORONTALO

Oleh :

AJON LUKUM

S2118050


SKRIPSI

Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal – – 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Tim Pembimbing dan Penguji :

- | | |
|--|---------|
| 1. Dr. Fatmah M. Ngabito, S.IP., M.Si | (.....) |
| 2. Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP | (.....) |
| 3. Sandi Prahara, ST., M.Si | (.....) |
| 4. Ripan Paputungan, S.IP., M.Si | (.....) |
| 5. Novalliansyah Abdussamad, S.IP., MA | (.....) |

Mengetahui


Dekan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN : 091308602


Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan
Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajon Lukum
NIM : S2118050
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Membantu Pemerintah
Kecamatan Mootilango Dalam Penanganan Covid 19
di Kabupaten Gorontalo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 5 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Ajon Lukum

NIM. S2118050

ABSTRAK

AJON LUKUM. NIM: S2118050. Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Pemerintah Kecamatan Mootilango Dalam Penanganan Covid 19 Di Kabupaten Gorontalo. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2022. Dibimbing oleh Bapak Ripan Paputungan, S.Ip, M.sidan Bapak Novaliansyah Abdussamad, S.IP, MA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk bagaimana kemudian mendeskripsikan suatu objek atau setting social suatu tulisan yang kemudian sifatnya naratif. Informan dalam penelitian ini adalah camat Mootilango, gugus tugas kecamatan Mootilango (1 orang), kepala desa (tiga orang) dan warga masyarakat yang bertempat tinggal di area lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan covid 19, pemerintah kecamatan Mootilango menitikberatkan pada kepatuhan protokol kesehatan dengan cara menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya covid 19. Adapun partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 sudah berjalan cukup baik.

Kata kunci : partisipasi masyarakat, penanganan covid 19, pemerintah kecamatan

ABSTRACT

AJON LUKUM. S2118050. THE COMMUNITY PARTICIPATION IN HELPING THE MOOTILANGO SUBDISTRICT GOVERNMENT IN HANDLING COVID 19 IN GORONTALO DISTRICT

This study aims to find out the community participation in helping the Mootilango Subdistrict government in handling Covid 19 in Gorontalo District. This study uses a descriptive qualitative research method to describe the object or social setting of this study in narrative presentation. The informants in this study cover the Mootilango Subdistrict head, the Mootilango Subdistrict task force (1 person), the village heads (three people), and community members who live in the area. The results of the study show that community participation in helping the Mootilango Subdistrict government in handling Covid 19 has been quite well. The community has participated in self-quarantining if they have had contact with people infected with COVID-19 and self-isolating if they are declared positive for COVID-19 with mild symptoms. Likewise, with participation in the form of contribution, the community helps the government distribute free masks to the community, provides some places for washing hands, and sprays disinfectants at places where people gather, such as mosques, offices, houses, and other places. Community participation is still low, namely implementing health protocols such as wearing masks when leaving the home, washing hands and keeping a distance from other people. The reason people do not comply with health protocols is to feel weird about all these activities carried out by the community.

Keywords: community participation, covid 19 handling, subdistrict government

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu (Q.S. Al Ankabut: 43)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

PERSEMBAHAN:

Ayahanda tercinta Rum Lukum dan ibunda tercinta Asna P. Abas yang telah mendidik dan membesarkan saya dari kecil, serta memberikan dukungan moril dan materil, sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya dengan baik.

Seluruh dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, khususnya dosen pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Teman-teman Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018

Almamater Tercinta Tempat Menimba Ilmu
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo
2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi, dengan judul Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Gorontalo. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Saya menyadari tanpa dorongan motivasi dan semangat dari bapak dosen pembimbing, maka skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tercinta Bapak Rum Lukum dan mama tercinta Asna P. Abas yang telah mendidik dan membesarkan saya dari kecil. Pada kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan ucapan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

Bapak DR. Abdul Gaffar La Cokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Arman, M.Si sebagai dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Darmawaty Razak, S.Ip, M.AP selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Ripan Paputungan, S.Ip, M.si selaku pembimbing I yang banyak memberikan koreksi perbaikan, Bapak Novaliansyah Abdussamad, S.Ip, MA selaku pembimbing II yang banyak memberikan koreksi perbaikan, Seluruh Dosen, terutama bapak/ibu dosen pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Ichsan Gorontalo, dan Seluruh teman-teman mahasiswa

yang sama-sama kuliah pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, terima kasih atas motivasinya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Mudah-mudahan dalam hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan, dan masukan kepada pemerintah Kecamatan Mootilango di dalam mengambil keputusan terkait Covid 19 Akhirnya dengan harapan dan do'a semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.

Hormat saya,



AJON LUKUM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan publik untuk penanganan korona.....	7
2.2 Pengertian partisipasi	10
2.3 Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk pengendalianpenyebaran virus korona	14
2.4 Kerangka pikir penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Obyek penelitian.....	19
3.2 Jenis penelitian.....	19
3.3 Fokus penelitian.....	20
3.4 Informan penelitian.....	21
3.5 Jenis dan sumber data.....	21
3.6 Teknik pengumpulan data.....	22
3.7 Analisis data	22

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Uraian singkat lokasi penelitian	24
4.2	Hasil penelitian dan pembahasan.....	26
4.3	Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 di kabupaten gorontalo.....	27
4.4	Patuh social-physical distancing/pembatasan jarak sosial-fisik.....	29
4.5	Self-quarantine/karantina mandiri.....	35
4.6	Self-isolation/isolasi mandiri.....	40
4.7	Sumbangan materi dan tenaga.....	47

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	55
5.2	Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Partisipasi masyarakat merupakan poin penting dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat pemerintah. Partisipasi telah muncul sebagai salah satu elemen inti pembangunan dewasa ini mengacu pada sejumlah alasan, yakni partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan dan kreatifitas masyarakat demi lajunya aktifitas suatu program pembangunan. Partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini kebutuhan masyarakat dan mengatur aktifitas pembangunan agar mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Diatas semua itu, partisipasi masyarakat merupakan cermin pengakuan mereka atas proyek maupun aktivitas, menumbuhkan komitmen dipihak masyarakat dalam implementasi program dan demi penguatan daya tahan program.

Tanpa partisipasi berupa keikutsertaan masyarakat secara sukarela, maka apapun bentuk kebijakan tersebut, pasti akan menemui hambatan dan bahkan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena masyarakatlah yang merupakan sasaran utama dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan untuk itulah, maka masyarakat pulalah yang pertama kali harus mendukung kebijakan tersebut. Terlebih dalam masa pandemi yang melanda dunia, termasuk Negara

Indonesia yang penyebarannya sudah meluas ke seluruh provinsi, tidak terkecuali di kabupaten Gorontalo provinsi Gorontalo.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona, namun tetap saja penyebarannya sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan protokol kesehatan, yakni 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), bahkan himbauan tidak keluar rumah, belajar dan bekerja di rumah, namun di lapangan masih banyak warga masyarakat yang tidak mematuhi. Hal ini membuktikan bahwa faktor pendukung utama untuk suksesnya kebijakan pemerintah tersebut adalah partisipasi warga masyarakat berupa mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, tanpa harus dipaksakan atau hanya karena takut kepada petugas di lapangan. Warga masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan ikut mensosialisasikan anjuran pemerintah terkait kebijakan penyebaran virus korona, dan mematuhi penerapan protokol kesehatan secara sukarela tanpa ada paksaan.

Khusus di provinsi Gorontalo, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan laju perkembangan virus korona. Berbagai kebijakan tersebut adalah pembatasan akses keluar masuk orang dari dua provinsi yakni provinsi Sulawesi utara dan Sulawesi tengah, menutup pasar mingguan selama pembatasan social berskala besar diterapkan, memberi batas waktu buka dan tutup untuk kegiatan usaha termasuk warung makan dan warung kopi, dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan pemerintah provinsi tersebut masih banyak ditemui pelanggaran.

Di samping pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Gorontalo pun, juga tidak tinggal diam untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dengan melakukan upaya penyebaran virus korona di wilayah kabupaten dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah yaitu peraturan Bupati Gorontalo nomor 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019. Untuk mensukseskan pelaksanaan peraturan bupati tersebut, pemerintah kabupaten membentuk satuan tugas, yakni satuan tugas percepatan penanganan virus korona. Satuan tugas ini dibentuk mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa dan kelurahan berdasarkan keputusan kepala wilayah masing-masing, dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kepatuhan warga masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, karena kebijakan ini diyakini dapat menekan laju perkembangan virus korona dengan syarat warga masyarakat mematuhi aturan protokol kesehatan yakni memakai masker setiap bepergian, mencuci tangan dan menjaga jarak dengan sesama warga. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua pihak, terutama warga masyarakat.

Kecamatan mootilango sebagai salah satu kecamatan dalam wilayah kabupaten gorontalo dalam menyukseskan kebijakan pemerintah kabupaten gorontalo tersebut, telah mengambil beberapa langkah, seperti pembentukan gugus tugas penanganan korona mulai dari tingkat kecamatan sampai ke desa, membuat pos penjagaan keluar masuk orang, mewajibkan masyarakat yang masuk ke desa mencuci tangan dan mewajibkan surat kewaspadaan bagi orang yang berasal dari luar kecamatan

mootilango. Di samping itu, pemerintah kecamatan juga membatasi berbagai kegiatan ibadah, sosial dan budaya dengan ketentuan standar kesehatan.

Semua upaya pemerintah Kecamatan mootilango tersebut, tidak akan berhasil tanpa bantuan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam mematuhi semua ketentuan yang dibuat pemerintah. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk mematuhi dan disiplin dalam melaksanakan anjuran pemerintah terutama mengenai penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga bisa dalam bentuk membantu warga masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat wabah korona dengan proaktif menggalang donasi dan menyumbangkan waktu serta tenaga untuk saling melindungi.

Namun permasalahan yang dihadapi dalam penanganan Covid 19 di lapangan yakni masih rendahnya tingkat partisipasi warga masyarakat untuk membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 yang terlihat dari masih banyak warga masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kepatuhan pada protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari warga, kurangnya partisipasi warga dalam menjaga pos penjagaan keluar masuk orang ke wilayah kecamatan mootilango, sehingga masuk keluar orang kurang terawasi, dan masih banyak kegiatan perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang atau terjadi keramaian. Permasalahan tersebut tentunya akan berakibat pada tidak maksimalnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan kebijakan pemerintah dalam penanganan korona. Dari hasil pengamatan saya selaku calon peneliti, permasalahan tersebut terjadi karena

masih kurang maksimalnya sosialisasi pemerintah kepada warga mengenai pentingnya partisipasi warga dalam penanganan corona, yang sering diinformasikan hanya bahaya corona dan protokol kesehatan.

Dari uraian masalah tersebut, akan dilakukan penelitian dengan judul partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan covid 19

b) Praktis

Penelitian juga dapat memberikan informasi kepada camat mootilango dan jajarannya dalam upaya penanganan korona, terutama dalam wilayah kecamatan mootilango

c) Akademis

Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan virus korona.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan publik untuk penanganan korona

Kebijakan publik sebagai salah satu instrumen dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah. Substansi kebijakan cenderung menjadi batasan yang telah melembaga (mapan). Friedrich dikutip dalam Solichin wahab (2018:5) mengartikan kebijakan sebagai suatu aktivitas yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari keinginan individu, kelompok atau bahkan pemerintah dalam aspek tertentu karena adanya masalah seraya mencari peluang untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Sementara menurut David easton (2008) system terdiri dari unsure inputs, process, output, feedback, dan lingkungan. Lingkungan kebijakan dibagi dalam dua macam, yaitu intra dan extra societal environment. Dalam lingkungan ini mengalir dua inputs yaitu demands/claims dan supports yang kemudian diproses kedalam sistem politik yang selanjutnya melahirkan policy output, berupa policy dan decision.

Sejalan dengan itu, kebijakan publik dapat diartikan sebagai rangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pengertian kebijakan ini menurut Kartasasmita (2007:142) merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah,

(2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan public tersebut.

Menurut Ealau dan Prewitt dikutip dalam (Suharto, 2017) kebijakan adalah sebuah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat diri mereka yang mematuhi keputusan tersebut (yang terkena kebijakan itu). Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai aktivitas yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada pencapaian maksud tertentu (Suharto, 2017). Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Definisi yang dikemukakan ahli tersebut menganjurkan tersedianya ruang untuk mengintip presentasi kebijakan public. Bahkan masing-masing definisi hanya memiliki sedikit perbedaan dengan lainnya, hanya terletak pada perbedaannya yakni dalam melakukan analisa secara menyeluruh. Bagaimanapun juga, pada tataran umum kebijakan publik tidak seharusnya sama dengan semua apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hari ke hari pemerintah membuat keputusan, beberapa diantaranya disampaikan sementara yang lain hanya sebagai reaksi terhadap lingkungannya. Padahal, banyak aktivitas pemerintah yang semata-mata

melaksanakan kebijakan, namun aktivitas dan praktik tersebut bukanlah merupakan kewajiban itu sendiri.

Pedoman awal untuk membuat kebijakan public adalah memahami terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan yang akan dicapai oleh organisasi (negara). Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dibuat nantinya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi, kemudian setelah itu, maka perlu dibuat program-program yang mendukung pencapaian kebijakan yang dimaksud.

Seperti halnya dalam masa pandemic korona, pemerintah pusat dan pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan public untuk menekan laju perkembangannya, dan juga sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan nyawa penduduk sebagai wujud tanggung jawab sebagai pembuat keputusan public. Kebijakan public merupakan landasan penentu sebagai langkah awal untuk menangani virus koronan dengan baik. Darmin tuwu, dkk dalam jurnal dinamika kebijakan penanganan pandemic covid-19 dalam perspektif kesejahteraan sosial, 2021:99) berkata: wabah korona merupakan wabah penyakit yang berbahaya karena terbukti telah merenggut jutaan nyawa diberbagai belahan dunia dan harus segera dicari jalan keluarnya oleh pemerintah dan masyarakat, dengan membuat kebijakan public yang tepat untuk mengatur kebiasaan baru masyarakat dalam menghadapi virus korona.

Kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus korona yakni berupa kebijakan pembatasan, apakah itu pembatasan social berskala besar atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pastinya akan berdampak

pada aktivitas social dan ekonomi masyarakat, dan dampak ini harus dipikirkan oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan publick. Untuk itu pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait pembatasan aktivitas masyarakat, harus mendapat dukungan berupa partisipasi dari warga masyarakat serta kemampuan pemerintah untuk memberikan jaminan berupa bantuan ekonomi kepada warga masyarakat yang terdampak virus korona (Masudi (dikutip dalam Darmin tuwu, dk, 2021:99).

2.2 Pengertian partisipasi

Seorang pemimpin yang mampu meningkatkan partisipasi bawahannya cenderung lebih lancar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibanding yang tidak mampu atau tidak mau meningkatkan partisipasi bawahannya. Hal ini disebabkan karena dengan meningkatkan partisipasi berarti bawahan akan diikutsertakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain dalam pembuatan perencanaan serta pengambilan keputusan. Dengan demikain, bawahan akan merasa lebih dihargai sehingga tanggung jawabnya dapat ditingkatkan. Peningkatan partisipasi yang berhasil tidak hanya dapat meningkatkan rasa harga diri bawahannya, tetapi juga dapat menimbulkan rasa ikut memiliki.

Hoofsteede yang dikutip Khairuddin (2018) berkata bahwa partisipasi berarti keikutsertaan seseorang secara penuh, baik fisik, mental, maupun emosionalnya sesuai dengan kemampuan masing-masing individu dalam proses pembangunan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi mereka ikut berpartisipasi karena kesadaran yang mereka miliki, bukan karena terpaksa atau takut pada pihak tertentu. Agak berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hoofsteede, Davis (2012) memberikan

pengertian mengenai partisipasi sebagai keikutsertaan mental dan perasaan sensitive orang-orang dalam keadaan tertentu dan mendorong mereka untuk memberikan peran kepada kelompok dan ikut bersama-sama mencapai tujuan yang dimaksud.

Slamet (2018;23) mengatakan partisipasi terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- Partisipasi bentuk pasif, artinya sikap, perilaku dan tindakan masyarakat, tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi kelancaran jalannya roda pemerintahan
- Partisipasi bentuk aktif, artinya terlibat untuk mewujudkan dalam berbagai bentuk seperti: turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial politik yang ada dalam masyarakat sebagai saluran aspirasi; mewujudkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain; memiliki kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab seperti adanya ketaatan kepada adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pendapat ahli di atas, Khairuddin (2018) berkata bahwa dalam pengertian ini paling tidak mengandung gagasan-gagasan, yakni:

- Keterikutan mental dan emosional. Keterlibatan mental dan emosional dalam partisipasi sangat diperlukan, daripada hanya berupa kegiatan fisik semata. Artinya bahwa keterlibatan masyarakat harus berbentuk psikologis dan tidak hanya fisik semata.

- **Kontribusi.** Kontribusi terkait keinginan pribadi dari orang-orang yang ikut dalam kegiatan partisipasi tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa orang yang terlibat harus mempunyai motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak kedua.
- **Tanggungjawab.** Tanggungjawab terkait kuat dengan dorongan motivasi dalam diri individu. Dalam kegiatan partisipasi diharapkan dapat terjadi proses interaksi antara individu dengan individu lain, yang mengakibatkan timbulnya rasa tanggungjawab untuk mewujudkan keberhasilan bersama. Tanggungjawab juga sangat penting dalam partisipasi.

Dalam penanggulangan wabahh korona, partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai masukan dalam penanggulangan wabahh korona dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi kesehatan masyarakat yang bersangkutan, dan sebagai keluaran partisipasi dapat digerakkan atau dibangun dengan memberikan motivasi melalui berbagai upaya untuk menimbulkan rasa tanggungjawab masyarakat bahwa penanggulangan wabahh korona tidak akan berhasil kalau tanpa diikuti oleh dukungan berupa partisipasi masyarakat, baik dalam mematuhi anjuran pemerintah maupun dalam menyebarkan atau mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan virus korona.

Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah dalam penanggulangan virus korona sudah banyak bermunculan dari berbagai daerah, mulai dari penyediaan alat pelindung diri secara mandiri, pembuatan masker oleh para penjahit local yang merasa prihatin dengan ketercukupan persediaan masker, menyediakan wadah untuk cuci tangan warga masyarakat di tempat umum, dan lain-lain. Menurut Rusli dikutip oleh Yudan hermawan dan akhmad rofiq dalam jurnal partisipasi masyarakat dalam pencegahan covid-19 (2020;18) berkata bahwa terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat, yakni a) partisipasi dalam bentuk pemikiran, yaitu partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa pemikiran, ide-ide, saran-saran, dan gagasan; b) partisipasi dalam bentuk memberikan materi, baik itu berupa barang atau bisa juga anggran; c) partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga seperti ikut terlibat dalam menyediakan hand sanitizer, membangun pos jaga untuk mengecek warga yang masuk dan keluar dari wilayah mereka; d) partisipasi dalam bentuk pemanfaatan, seperti pemanfaatan tempat-tempat yang disediakan pemerintah untuk isolasi mandiri, dan lain-lain.

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah dalam penanggulangan virus korona memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak, terutama peran kepemimpinan dan lembaga yang mempunyai fungsi untuk itu. Partisipasi masyarakat tidak dapat diciptakan hanya dengan melalui pengumuman dan ajakan-ajakan saja. Ini merupakan proses yang cukup kompleks dan perlu dilakukan secara sistematis melalui penerapan pendekatan, metode-metode dan teknik-teknik tertentu.

2.3 Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk pengendalian penyebaran virus korona

Partisipasi masyarakat akan membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat, dan membantu mengatur aktivitas kegiatan agar mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Di atas semua itu, partisipasi masyarakat merupakan cermin pengakuan mereka atas aktivitas, menumbuhkan komitmen di pihak masyarakat dalam implementasi kebijakan, dan demi penguatan daya tahan kebijakan. Demikian halnya, dengan kebijakan pemerintah tentang virus korona, tentunya sangat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat secara luas karena tidak mungkin semua aktivitas mereka dapat diawasi oleh petugas penanganan korona.

Tanpa adanya dukungan berupa partisipasi masyarakat, maka akan sulit sekali untuk mengharapkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengendalian virus korona. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan elemen utama dalam mencegah penyebaran virus korona. Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan social, namun masih banyak warga masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, hal ini tentunya akan tetap berdampak buruk karena tidak akan dapat memutus mata rantai penyebaran korona, walaupun ada masyarakat yang sudah mematuhi ketentuan tersebut.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam membantu pemerintah untuk pengendalian penyebaran virus korona menurut

Muhamad mulyadi dalam jurnal partisipasi masyarakat dalam penanganan penyebaran covid-19 (2020: halaman 15), yaitu:

a. PATUH PADA PENGATURAN JARAK SOSIAL ATAU FISIK,
KARANTINA MANDIRI DAN ISOLASI MANDIRI

Pengaturan jarak social (social distancing) atau biasanya juga disebut physical distancing merupakan cara untuk melakukan pencegahan dan mengendalikan virus korona, yang wujudnya berupa mengurangi kunjungan ke lokasi yang banyak dikunjungi orang atau melakukan tatap muka dengan sesama warga. Partisipasi warga masyarakat berupa kesadaran menjaga jarak fisik antar sesama warga merupakan faktor yang menentukan untuk mencegah penyebaran virus korona. Aktivitas dalam physical distancing yang biasanya dilakukan ialah bekerja dari rumah bagi para pekerja, belajar dari rumah untuk para pelajar, dan tidak menghadiri acara atau pertemuan yang dihadiri banyak orang, seperti pernikahan, seminar dan lain-lain.

Pertanyaannya sekarang, mengapa pemerintah menganjurkan warga masyarakat untuk menjaga jarak sosial atau jarak fisik sangat penting, karena perpindahan virus korona melalui mulut dan hidung dapat berlangsung sangat cepat, maka mengatur jarak social atau jarak fisik diyakini dapat memutus mata rantai penyebaran virus korona

Setiap warga sangat perlu untuk menerapkan pembatasan jarak social atau jarak fisik, dimana kegiatan ini dapat dilakukan mengurangi aktivitas di luar rumah

kecuali hanya keperluan untuk membeli bahan makanan yang diperlukan atau untuk memeriksakan diri ke rumah sakit kalau merasa kurang sehat atau ada anggota keluarga yang kurang sehat. Anjuran lainnya, sedapat mungkin tidak menggunakan transportasi umum kalau bepergian, membatasi atau menjaga jarak minimal satu meter dari orang lain apabila bertemu di tempat umum, serta kalau tidak terlalu penting disarankan untuk tidak pergi liburan keluar negeri maupun liburan keluar daerah. Hal ini semua, tentunya membutuhkan dukungan berupa partisipasi warga masyarakat untuk menahan diri agar tidak melanggar anjuran yang dimaksud.

Partisipasi lain yang diharapkan dari masyarakat ialah karantina mandiri (self quarantine). Karantina mandiri merupakan pembatasan aktivitas dan tinggal di rumah selama 14 hari, yang dilakukan secara sukarela sebagai upaya untuk melindungi diri dari penyakit menular dan menghentikan penyebarannya. Kegiatan ini dilakukan oleh warga yang memiliki resiko tinggi terinfeksi virus korona tetapi belum menunjukkan gejala, karena yang bersangkutan pernah bertemu atau kontak langsung dengan warga yang positif korona. Warga masyarakat yang pernah berkunjung ke daerah yang terdampak korona, juga diharapkan melakukan karantina mandiri setelah kembali ke tempat asal.

Adapun partisipasi dalam bentuk isolasi mandiri (self isolation) dilakukan oleh warga masyarakat yang sudah dinyatakan positif terinfeksi korona. Sebenarnya partisipasi melalui isolasi mandiri ini merupakan upaya penanganan yang bersifat alternatif apabila tempat yang ditentukan untuk menangani pasien positif, sudah tidak mampu lagi menampung pasien positif korona, seperti puskesmas, rumah sakit,

dan tempat khusus yang ditunjuk pemerintah untuk dijadikan tempat penampungan sementara pasien positif corona.

b. SUMBANGAN MATERI DAN TENAGA

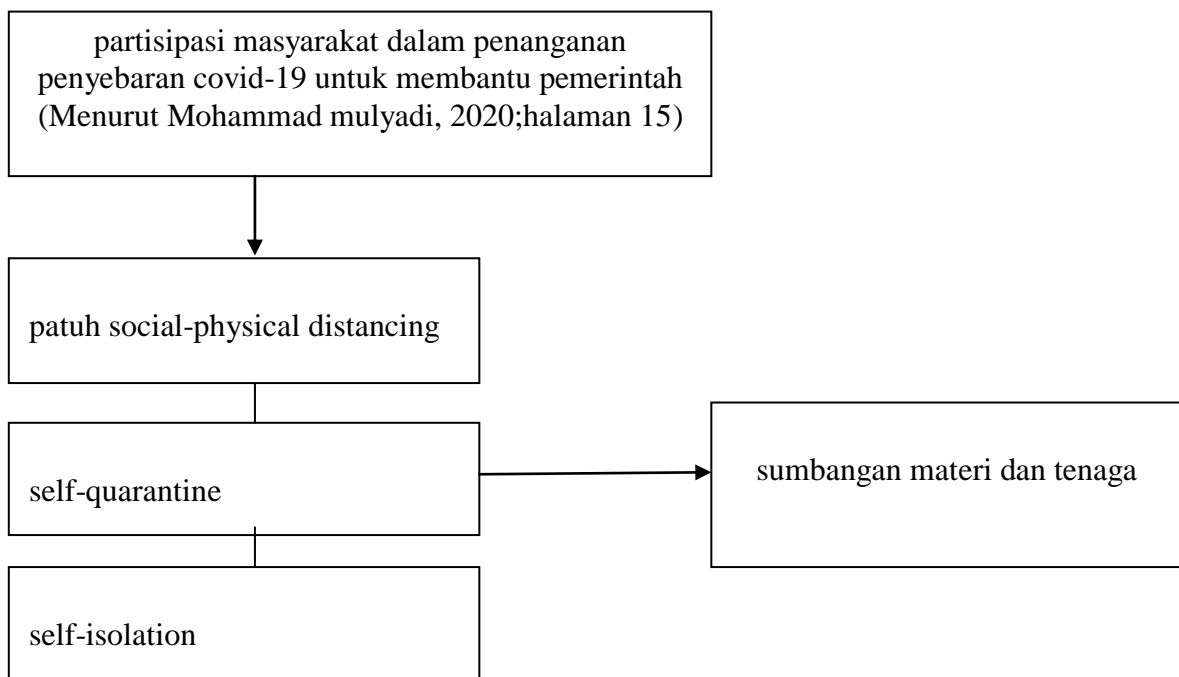
Partisipasi warga masyarakat dalam bentuk sumbangan materi dan tenaga, banyak dilakukan warga masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Di berbagai daerah, banyak komunitas masyarakat merasa prihatin dengan cepatnya penyebaran virus corona dan bahkan memakan korban jiwa, baik pada warga maupun tenaga medis. Hal ini yang membuat mereka merasa tergerak untuk melakukan sesuatu guna membantu meringankan beban pemerintah dalam penanganan wabah virus corona. Di dampit misalnya komunitas social membagikan secara gratis ribuan masker kepada warga dan pengendara kendaraan di jalan, demikian juga ibu-ibu darmawanita, beramai-ramai membuat masker untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar, karena pada saat itu harga masker tiba-tiba melonjak naik. Di kota Bandung, rumah zakat, ikut menyumbangkan alat pelindung diri (APD) kepada para medis di puskesmas dan tiga rumah sakit untuk menutupi kurangnya alat pelindung diri bagi aparat kesehatan.

Demikian halnya di sejumlah kompleks perumahan di Jabodetabek, warga secara sukarela memasang alat semprot di pintu gerbang perumahan dan menyediakan tempat cuci tangan. Di bagian lain, sejumlah warga juga menyemprotkan disinfektan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Disisi lain, sejumlah tokoh agama terus aktif menghimbau kepada warganya untuk tetap berada

di rumah apabila tidak ada kegiatan yang mendesak untuk dilakukan, serta melakukan ibadah di rumah untuk sementara waktu.

2.4 Kerangka pikir penelitian

Pemerintah kecamatan Mootilango dalam penanganan covid-19 menerapkan beberapa pendekatan sesuai instruksi pemerintah pusat dan kabupaten gorontalo, yakni pendekatan social distancing (jaga jarak), stay at home (tetap di rumah), cuci tangan dengan sabun, dan memakai masker jika keluar rumah terutama bagi yang kurang sehat. Semua pendekatan dalam penanganan covid-19 tersebut, tentunya membutuhkan partisipasi warga masyarakat karena tanpa partisipasi masyarakat, maka semua upaya tersebut akan gagal. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendapat Mohammad mulyadi dalam jurnal partisipasi masyarakat dalam penanganan penyebaran covid-19 (2020: halaman 15), partisipasi masyarakat dapat berupa: a) patuh social-physical distancing, self-quarantine dan self-isolation, dan b) sumbangan materi dan tenaga. Untuk itu, dapat digambar kerangka pikir berikut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Gorontalo.

3.2 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk bagaimana kemudian mendeskripsikan suatu objek atau setting social suatu tulisan yang kemudian sifatnya naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Pendeskripsian sesuatu itu artinya menggambarkan apa, mengapa, bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam membuat suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan dari kata/fakta yang diangkat di lapangan untuk kemudian memberikan ilustrasi utuh dan juga dapat memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif bagus dan cocok digunakan untuk penelitian ini, dikarenakan sesuai dengan niat peneliti, Yaitu untuk mendapatkan data/fakta tentang “partisipasi masyarakat dalam penanganan covid 19 bertempat di kecamatan Mootilango”.

3.3 Fokus penelitian

Dalam konteks penelitian kualitatif, diperlukan adanya focus kajian yang merupakan akumulasi dari hasil permasalahan-permasalahan awal yang ditemukan guna memperjelas arah, serta inti dari penelitian seorang peneliti. Oleh karenanya yang menjadi fokus penelitian ini adalah.

1) Patuh social-physical distancing, self-quarantine dan self-isolation

Social distancing adalah langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus korona dengan membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain.

Self-quarantine ditujukan kepada orang yang beresiko tinggi terinfeksi covid-19, misalnya pernah kontak dengan penderita covid-19, tetapi belum menunjukkan gejala.

Self-isolation diberlakukan pada orang yang sudah terbukti positif menderita penyakit covid-19.

2) Sumbangan materi dan tenaga

Sebagai wujud turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyebaran wabah virus covid-19, berbagai elemen masyarakat ikut menyumbangkan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat umum.

3.4 Informan penelitian

Informan dari penelitian ini adalah terdiri dari beberapa informan yaitu, camat Mootilango, gugus tugas kecamatan Mootilango (1 orang), kepala desa (tiga orang) dan warga masyarakat yang bertempat tinggal di area lokasi penelitian.

3.5 Jenis dan sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang kemudian diungkapkan dalam penelitian yang bersifat skematik, narasi dan uraian juga penjelasan data dari informasi baik lisan maupun data dokumen yang tertulis, perilaku subjek yang diamati lapangan juga menjadikan data untuk pengumpulan hasil penelitian yang kemudian dapat dilihat atau dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara. Untuk panduan pembicaraan antara peneliti dengan informan untuk bagai mana supaya mendapatkan bukti penilaian.
- b. Dokumentasi/foto. Studi dokumentasi ialah terutama mengenai akurasi yang tepat mengenai sumber dokumen, bermanfaat bagi bukti penelitian, dan sesuai dengan standar kualitatif, tidak reaktif.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dimiliki oleh kantor kecamatan Mootilango dan masyarakat sebagai data pendukung dalam penelitian yang dapat mensupport dalam kelengkapan data primer.

3.6 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian yang luass serta mendalam, maka dalam upaya yang harus dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a) observasi. Menurut Burhan bungin (2011:115), observasi adalah metode pengumpulan data yang kemudian digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
- b) Wawancara. Untuk melakukan wawancara bahwa, untuk dibuat pedoman yang dijadikan acuan dan isntrumen wawancara yang kemudian dilakukan itu bersifat terbuka, terstruktur dengan pedoman yang ada.
- c) Dokumentasi. Studi dokumentasi terutama mengenai akurasi sumber dokumen dan data yang bermanfaat bagi bukti penelitian, dan sesuai dengan standar kualitatif, dan reaktif.

3.7 Analisis data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan analisis interaktif (interactive model analysis) menurut Miles dan huberman diterjemahkan oleh (Tjetjep rohendi 1992) yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yaitu:

1. Pengumpulan data (data collection)

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berbentuk soft copy serta emlalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten.

2. Reduksi data

Data yang didapatkan dari lokasi penelitian tersebut kemudian di reduksi oleh peneliti yang di fokuskan dalam hal-hal penting. Proses reduksi data dapat berlangsung selama penelitian masih diberlakukan.

3. Penyajian data

Data yang telah dipilih dan diatur menurut kelompok data serta dengan berbagai macam kategori data yang kemudian diselaraskan dengan permasalahan yang ada. Hal ini untuk memudahkan bagi peneliti dalam mendapatkan hasil penelitian itu sendiri.

4. Menarik kesimpulan

Kegiatan ini merupakan suatu proses untuk menarik kesimpulan dari kategori data telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Uraian singkat lokasi penelitian

Kecamatan Mootilango merupakan salah satu dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kecamatan ini terdiri atas 10 Desa. Batas wilayah kecamatan mootilango, sebelah timur kecamatan pulubala, sebelah barat kecamatan tolangohula, sebelah utara kabupaten gorontalo utara dan sebelah selatan Kecamatan Mootilango.

Kecamatan mootilango terdiri dari 10 desa, yaitu:

Nama desa	Luas Km ²	Persentase terhadap luas kecamatan
Talumopatu	7,7	5,54
Sidomukti	6,0	4,32
Karyamukti	6,7	4,85
Satria	2,4	1,74
Paris	6,5	4,69
Helumo	4,4	3,14
Pilomonu	25,0	18,06
Huyula	40,4	29,21
Payu	18,0	13,00
Sukamaju	21,4	15,45

Dalam pemerintahan, sudah ada beberapa tokoh yang memerintah di Kecamatan mootilango, yaitu:

No.	Nama pejabat	Tahun menjabat
1	Taufik Sidiki	2002-2003
2	Drs Asri W Banteng	2003-2005
3	Drs. Ismet Tuhala	2005-2005
4	Muhtar T.S Nuna, S.SSTp	2005-2007
5	Ir. Budianto AR Olii	2007-2008
6	Harli Ishak, S.Ag	2008-2008
7	Syaiful Kiraman, SE	2008-2010
8	Radjak Arasi, Ama PD	2010-2012
9	Husain Ui, SE, M.Si	2012-2012
10	Mulyadi Domili, S.Ag	2013-2014
11	Rachmad K Mohamad, SKM	2014-2017
12	Sjarifudin	2017-2019
13	Johan A Poliwan	2019-2022
14	Hasim Rifai, S.Pd, MM	2022-sekarang

Jumlah penduduk kecamatan Mootilango pada tahun 2021 adalah 19 552 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 9 969 jiwa dan penduduk perempuan 9 583 jiwa.

Rasio jenis kelamin penduduk Boliyohuto adalah 104, Ini berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

4.2 Hasil penelitian

Dua tahun lebih sudah virus korona melanda dunia dan termasuk Negara kita bahkan sampai masuk ke provinsi Gorontalo. Tidak lama setelah masuknya virus tersebut ke gorontalo, cepat atau lambat perlahan-lahan sudah menyebar masuk kesemua kabupataen dan kota yang ada di provinsi Gorontalo, tidak terkecuali di kabupaten Gorontalo. Berbagai upaya dilakukan pememrintah kabupaten Gorontalo untuk menanggulangi penyebaran covid 19, mulai dari penerapan pembatasan sosial berskala besar, kemudian kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Di samping itu juga dilakukan pembentukan gugus tugas untuk penanganan covid 19 mulai dari tingkat kabupaten sampai desa dan kelurahan. Upaya lain yang juga diambil pememrintah kabupaten yakni giat mendirikan posko pengendalian korona di tingkat desa dan kelurahan, menyiapkan fasilitas isolasi terpusat (isoter) di Wisma Atlet kabupaten gorontalo, kemudian di tingkat kecamatan dan desa / keluraha juga disiapkan ruang khusus untuk isolasi warga masyarakat yang terkonformasi korona. Dan untuk saat ini upaya penanggulangan korona yang sedang digiatkan yakni pemberian vaksinasi kepada warga masyarakat mulai dari anak-anak sampai lansia, mulai dari vaksin satu dan dua menggunakan Sinovak, dan sekarang vaksin lanjutan (booster). Semua kebijakam yang telah diambsil oleh pemerintah kabupoaten sampai kecamatan tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19. Pendapat ahli yang peneliti gunakan untuk meneliti partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango ialah Mohammad mulyadi (2020: halaman 15), partisipasi masyarakat dapat berupa:

- 3) Patuh social-physical distancing/pembatasan jarak sosial-fisik, self-quarantine/karantina mandiri dan self-isolation/isolasi mandiri
- 4) Sumbangan materi dan tenaga

4.3 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PEMERINTAH KECAMATAN MOOTILANGO DALAM PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN GORONTALO

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mensukseskan semua kebijakan dan program yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Demikian pula partisipasi masyarakat dalam menyukses peraturan Bupati Gorontalo nomor 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019, sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten Gorontalo. Peraturan bupati tersebut sangat menghendaki warga masyarakat untuk disiplin dalam penegakan protokol kesehatan, seperti memakai MASKER dengan baik saat keluar rumah, selalu mencuci tangan di air yang mengalir atau menggunakan HAND SANITIZER, menjaga jarak minimal 1 meter, kecuali sektor pendidikan 1,5 meter,

menghindari tempat-tempat keramaian, dan melakukan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dimanapun berada. Jika melihat bentuk pelaksanaan protokol kesehatan tersebut kelihatannya mudah dilakukan oleh warga masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya sangat sulit karena semua kegiatan yang dituntut dalam protokol kesehatan tersebut adalah merupakan kebiasaan atau kegiatan yang jarang kita lakukan sehingga sering dilupa atau tidak dilaksanakan karena belum adanya kesadaran dalam diri warga masyarakat. Berbagai pelanggaran protokol kesehatan tersebut dapat kita lihat dari banyaknya pelanggaran protokol kesehatan, baik secara langsung disekitar kita maupun lewat televisi dan media massa lain seperti koran, radio, dan lain-lain, yakni ketika warga melakukan aktivitas sehari-hari, seperti tidak memakai masker karena lupa, dan bermacam pelanggaran protokol kesehatan lainnya.

Untuk itulah sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, pemerintah kecamatan Mootilango membentuk satuan gugus tugas yang anggota terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, kepolisian/TNI, kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Susunan keanggotaan gugus tugas penanganan korona kecamatan Mootilango yakni:

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (DI KECAMATAN MOOTILANGO

KETUA: Hasim Rifai, S.Pd. MM

WAKIL KETUA: Nurdin S. Djibu

Ipda. Alpian Hilahapa, SH

SEKRETARIS: Akuman Sahabo, SKM

ANGGOTA: Ariyanto Darise, S.Ag

Santi ismail, SH

Aten T pakaya, SE

Herson M Hasan, SH. MH

Yusra ahmad, STP

Brippol Misran alie

Bripka Suparman rivai

Bripka Anis tane

Hadijah manhia, SKM

Ben gusti amara, S.Kom

Satima rivai, STP

Roni dalu

Tugas utama gugus tugas ini yakni melakukan koordinasi dan pengendalian virus korona dan mengerahkan sumber untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan covid 19 di seluruh wilayah kecamatan Mootilango.

4.4 PATUH SOCIAL-PHYSICAL DISTANCING/PEMBATASAN JARAK SOSIAL-FISIK

Pembatasan jarak sosial-fisik merupakan pembatasan jarak manusia secara fisik dan bukan mengurangi atau memutuskan hubungan sosial dengan kerabat terdekat kita, teman kerja, dan sebagainya, serta menghindrai pertemuan berskala besar atau kerumunan. Pembatasan jarak sosial-fisik merupakan salah cara untuk menghindari meluasnya penyebaran virus korona. Anjuran ini tentunya akan berhasil

apabila warga masyarakat sebagai pelaku utama mau memberikan dukungan dalam bentuk berpartisipasi untuk melakukan pembatasan fisik dengan orang terdekat atau keluarga, teman, dan orang lain di sekitarnya. Warga dapat berpartisipasi melalui ikut menjaga jarak satu sama lain dengan cara banyak berdiam di rumah masing-masing untuk sementara waktu dan tidak bepergian kalau tidak terlalu penting, tapi tetap menjalin hubungan kekeluargaan dan keeratan melalui media sosial dengan keluarga atau teman.

Pemerintah kecamatan Mootilangdon gugus tugas memang menekankan kepada warga masyarakat untuk patuh pada social-physical distancing/pembatasan jarak sosial-fisik karena kebijakan ini merupakan anjuran dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk dijalankan. Pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat termasuk pembatasan jarak dianggap cara yang paling efektif untuk mencegah lebih jauh penyebaran virus korona. Berikut ini akan disajikan hasil wawancara dengan informan.

Pertanyaan : Langkah-langkah apa yang pemerintah tempuh untuk mencegah dan mengendalikan virus korona?

Informan : Sekcam/Gugus tugas Mootilango (bapak Nurdin S. Djibu (Wawancara 1 maret 2022) mengatakan:

“Yang pertama pemerintah kecamatan mootilango mengadakan edukasi (tentang protokol kesehatan dan bahaya korona) di setiap desa bersama unsur terkait seperti dari kepolisian, TNI dan bekerjasama dengan puskesmas”

Informan: KEPALA DESA HUYULA (bapak IRMAN NASIR, 10 Maret 2022)

mengatakan:

‘Langkah awal kami bentuk satuan tugas covid desa, kemudian dari satgas itu melaksanakan semua kegiatan pengendalian sesuai dengan edaran pemerintah daerah dari pusat, sehingga dalam mengendalikan covid di desa kami yang mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya virus korona, melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat dan operasi masker, dan juga menyediakan tempat cuci tangan di rumah-rumah penduduk, untuk menerapkan 3 M dan protokol kesehatan, begitu juga di tempat-tempat keramaian, kantor kami sediakan hand sanitizer dan tempat-tempat cuci tangan, tim ini juga yang memantau pergerakan kegiatan masyarakat dan kami juga melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat’.

Informan: KEPALA DESA SATRIA (BAPAK SUNARDI, 8 Maret 2022)

mengatakan:

‘Sesuai dengan peraturan kemenkes, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan dan satunya lagi mengenai vaksin’.

Informan: KEPALA DESA PARIS (BAPAK AGUS DAWALI, S.KOM, 7 Maret 2022) mengatakan:

“Terkait pengendalian virus korona ini, maka langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ialah pertama menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan masyarakat, yakni:

Menurut anda apakah langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus korona oleh pemerintah kecamatan dan gugus tugas, sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku? Beri alasan anda

Informan: WARGA MASYARAKAT (AGUS SALIHI, wawancara 13 maret 2022)

mengatakan:

‘Iya sudah sesuai, buktinya mereka datang ke desa-desa untuk mensosialisasikan tentang protokol kesehatan yang harus masyarakat terapkan dalam setiap kegiatan sehari-hari dan bagaimana berbahayanya itu virus korona. Pemerintah kecamatan dan gugus tugas juga membagikan masker secara gratis kepada masyarakat dan memberikan hukuman kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti apabila tidak pakai masker ketika keluar rumah’.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran virus korona, pemerintah kecamatan Mootilango dan pemerintah desa memfokuskan pada penerapan protokol kesehatan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya virus korona yang mematiikan dan pentingnya untuk melaksanakan protokol kesehatan, seperti menghimbau masyarakat harus menjaga jarak apabila berada di keramaian, mengadakan tempat cuci tangan dan membagikan masker kepada warga masyarakat.

Kemudian untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu dipatuhi oleh warga masyarakat, pemerintah kecamatan dan gugus tugas mengawasi dengan ketat pelaksanaan protokol kesehatan tersebut dan memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggar prokes sesuai dengan peraturan bupati gorontalo nomor 32 tahun 2020 pasal 7, yakni teguran lisan dan teguran tertulis, kerja sosial serta denda administratif sebesar Rp. 150.000.

Pertanyaan : Bagaimana bentuk pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar? Mengapa!

Informan : Sekcam Mootilango/gugus tugas (bapak Nurdin S. Djibu (Wawancara 1 maret 2022) mengatakan:

‘Yang pertama bila ada masyarakat yang melanggar apabila sudah diadakan edukasi kepada mereka, maka biasanya bentuk sanksi yang diberikan oleh tim gugus tugas itu berupa penunadaan pemberian bantuan, itu mereka harus divaksin terlebih dahulu, artinya kalau sudah divaksin baru diberikan bantuan berupa beras dan lain sebagainya’

Informan: KEPALA DESA HUYULA (BAPAK IRMAN NASIR, 10 Maret 2022)

mengatakan:

“Untuk desa huyula ini kami laksanakan sesuai dengan amanat peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 termasuk pelayanan administrasi desa harus sudah melaksanakan vaksin sebagai syarat dalam pelayanan, begitu juga dengan pengguna jalan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan kami berikan teguran, kami berikan juga edukasi supaya mentaati protokol kesehatan bahkan tidak memberikan izin keramaian kepada masyarakat yang tidak taat kepada protokol kesehatan untuk kumpul dengan masyarakat lainnya”

Informan: KEPALA DESA SATRIA (BAPAK SUNARDI, 8 Maret 2022)

mengatakan:

‘Kalau untuk mengenai pemberian sanksi belum ada, Cuma mengenai bantuan sosial bagi penerima bantuan atau surat-surat yang akan diurus warga masyarakat, mungkin ditunda setelah dia melakukan anjuran pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni setelah vaksin’

Informan: KEPALA DESA PARIS (BAPAK AGUS DAWALI, S.KOM, 7 Maret

2022) mengatakan:

‘Iya, kami selaku pemerintah desa khususnya terkait pemberian sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan hanya diberikan sanksi administrasi, dan tidak ditentukan besaran biaya, kami hanya melakukan penegakan disiplin dimana kami lakukan hanya push up, karena aturan belum ada yang mengikat untuk kami merujuk pada salah satu aturan itu belum ada bagi warga yang melanggar protokol kesehatan’.

Kemudin peneliti menanyakan kepada informan masyarakat, yakni:

Apakah anda pernah melanggar, dan apakah diberi sanksi (teguran, kerja sosial, denda 150 ribu?

Informan: WARGA MASYARAKAT (AGUS SALIHI, wawancara 13 maret 2022)
mengatakan:

‘Iya pernah, saya lupa pake masker ketika pergi ke supermarket. Kebetulan pas di jalan ada petugas yang memberhentikan saya dan saya diberi masker dan dinasehati untuk selalu pakai masker apabila keluar rumah, jadi saya tidak diberi hukuman fisik oleh petugas polisi waktu itu’.

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada masyarakat sebagai berikut.

Pernahkah anda melanggar aturan sosial distancing? Berapa kali, dan mengapa?

Informan: WARGA MASYARAKAT (AGUS SALIHI, wawancara 13 maret 2022)
mengatakan:

‘Iya, tapi hanya sedikit yakni hanya satu kali saja karena lupa pake masker waktu bepergian naik motor. Kalau menyangkut jaga jarak, terus terang sering saya langgar tapi tidak dilihat petugas, karena jaga jarak susah dilakukan karena kebiasaan kalau saya bicara dengan teman biasanya berdekatan. Begitu pula kalau mau ketemu teman, saya biasanya ke rumahnya, jarang memakai telepon’

Dapat dikatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tentunya tidak semua dilaksanakan oleh warga masyarakat karena belum terbiasa dengan ketentuan yang dituntut, seperti memakai masker dan menjaga jarak, karena selama ini pemakaian masker dan jaga jarak dengan teman atau di keramaian, tidak pernah dilakukan oleh warga masyarakat sebelum adanya virus korona, sehingga butuh waktu untuk penyesuaian agar terbiasa. Hasil wawancara dengan informan adalah.

Pertanyaan : Apakah anda mendukung semua program pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 di kabupaten gorontalo? Mengapa!

Informan : WARGA MASYARAKAT (AGUS SALIHI, wawancara 13 maret 2022)

mengatakan:

‘Saya sangat mendukung karena semua program pemerintah tersebut untuk keselamatan kita juga, yakni karena dengan adanya program tersebut tentunya akan mengurangi terjadinya jumlah kasus masyarakat yang terkonfirmasi virus yang mematikan itu yakni virus korona’.

Dari informasi informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan Mootilango dan gugus tugas memberikan hukuman kepada warga yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, tapi hukuman yang diberikan bermacam-macam bentuk sanksi yakni fisik berupa push up dan sanksi administratif seperti penundaan pemberian bantuan. Pemberian hukuman kepada warga yang melanggar dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan warga masyarakat pada pelaksanaan protokol kesehatan.

4.5 SELF-QUARANTINE/KARANTINA MANDIRI

Karantina mandiri merupakan bentuk partisipasi warga masyarakat apabila warga tersebut pernah melakukan kontak dengan orang yang dinyatakan positif virus korona namun belum menunjukkan gejala korona. Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat sebagai berikut.

Pertanyaan : Apakah pemerintah kecamatan dan desa menyediakan tempat khusus untuk masyarakat melakukan karantina mandiri? Mengapa?

Informan : Sekcam Mootilango/gugus tugas (bapak Nurdin S. Djibu (Wawancara 1 maret 2022) mengatakan:

“Ada di yaitu sepuluh desa yang ada di kecamatan mootilango dimana setiap desa sudah menganggarkan untuk menyediakan bangunan khusus untuk

karantina. Untuk mencegah penularan covid 19 itu kepada masyarakat yang sehat”

Kemudian peneliti menanyakan hal yang sama kepala kepala desa, yaitu:

Informan: KEPALA DESA HUYULA (BAPAK IRMAN NASIR, 10 Maret 2022)

mengatakan:

‘Sebenarnya ada di suatu ruangan yang disiapkan untuk karantina mandiri, kami sediakan khusus ada tempat tidurnya dan juga diperhatikan oleh pemerintah, tetapi selama ini belum ada yang pernah atau sempat di karantina, kalau ada yang terkonfirmasi mereka memilih karantina di rumah sendiri atau melakukan karantina mandiri’

Informan: KEPALA DESA SATRIA (BAPAK SUNARDI, 8 Maret 2022)

mengatakan:

‘Tidak ada, Cuma di rumah sendiri’

Informan: KEPALA DESA PARIS (BAPAK AGUS DAWALI, S.KOM, 7 Maret

2022) mengatakan:

‘Kami di desa paris menyediakan salah satu tempat untuk karantina khusus, tetapi kemarin ada beberapa warga yang terpapar korona tetapi mereka memilih untuk karantina mandiri’

Kemudian penelitian menanyakan kepada warga yang pernah melakukan isolasi mandiri.

Pertanyaan: Menurut anda, apakah dan bagaimana pemerintah kecamatan menyediakan tempat khusus untuk karantina mandiri? Apa perlu?

Informan: Yahya Idris(wawancara 14 maret 2022) mengatakan:

“Iya, perlu diadakan tempat khusus untuk karantina guna memutuskan mata rantai penyebaran virus korona. Pemerintah desa juga telah menyediakan tempat untuk karantina bagi warga sebagai antisipasi kalau pemerintah kecamatan

kewalahan menampung pasien karantina. Tapi pada umumnya warga memilih untuk karantina di rumah mereka”.

Dari pendapat informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan mootilango dan pemerintah desa telah menyiapkan tempat karantina khusus berupa rumah untuk warga masyarakat yang baru datang dari luar daerah dan warga yang pernah kontak dengan warga yang positif corona namun belum ada gejala. Penyediaan tempat karantina ini dimaksudkan agar warga masyarakat yang sehat tidak terkonfirmasi virus corona walaupun warga yang dikarantina tersebut belum tentu positif terinfeksi corona.

Penyediaan tempat karantina untuk masyarakat dilakukan untuk warga yang tidak mau melakukan karantina mandiri di rumah karena takut jangan sampai mereka sudah terinfeksi virus corona tapi tanpa ada gejala, sehingga kalau mereka melakukan karantina mandiri di rumah maka bisa saja keluarga mereka, istri, suami dan anak akan terinfeksi virus corona juga. Untuk itu pemerintah kecamatan mootilango dan pemerintah desa terus memantau secara ketat kalau ada warga masyarakat yang terinfeksi corona langsung diisolasi, dan warga masyarakat yang pernah kontak dengan penderita corona, langsung dicari atau didatangi rumahnya untuk diminta melakukan karantina mandiri, baik karantina di rumah atau di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Hasil wawancara dengan informan adalah.

Pertanyaan: Apa yang dilakukan jika ada masyarakat yang melakukan kontak dengan penderita corona, namun tidak mau melakukan karantina mandiri?

Informan: Sekcam Mootilango/gugus tugas (bapak Nurdin S. Djibu (Wawancara 1 maret 2022) mengatakan:

“Dalam rangka untuk mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kontak dengan penderita korona, biasanya pada saat misalnya terjadi wabah itu masyarakat tentunya diharapkan untuk tidak melakukan kontak dengan warga yang terkena korona, dan selayaknya dilakukan karantina mandiri, biasanya masyarakat yang terkena kontak biasanya langsung ada penjemputan oleh pihak kesehatan, pihak polisi dan tentara, seperti itu yang dilakukan supaya menjaga putusnya penyebaran korona”.

Kemudian peneliti menanyakan hal yang sama kepala kepala desa, yaitu:

Informan: KEPALA DESA HUYULA (BAPAK IRMAN NASIR, 10 Maret 2022) mengatakan:

‘Yang kontak dengan penderita korona, kami langsung mendatangi orang tersebut untuk langsung diarahkan untuk melakukan test swab dan kami menyarankan kepada masyarakat sekitar untuk tidak ada kontak dengan pasien’

Informan: KEPALA DESA SATRIA (BAPAK SUNARDI, 8 Maret 2022) mengatakan:

‘Saya bekerjasama dengan pihak satgas kecamatan melakukan edukasi kepada warga masyarakat supaya yang bersangkutan mau diperiksa dan di swab’

Informan: KEPALA DESA PARIS (BAPAK AGUS DAWALI, S.KOM, 7 Maret 2022) mengatakan:

‘Tentunya mereka tetap dipantau aktivitas mereka dan tidak bisa melakukan kontak dengan masyarakat dan mereka dihimbau untuk untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah selama masih dalam tahapan ataupun pemulihan selama kurang lebih 14 hari untuk melakukan isolasi di rumah yang bersangkutan’

Selanjutnya peneliti tanyakan kepada informan warga yang pernah karantina mandiri adalah.

Pertanyaan: Pernahkah anda melakukan kontak dengan penderita covid 19?

Mengapa!

Informan: Yahya Idris(wawancara 14 maret 2022) mengatakan:

“Iya.Karena kebetulan yang terkonfirmasi covid itu keluarga terdekat saya.Saya tidak kalau dia terkonfirmasi korona, nanti setelah dinyatakan positif korona, petugas meminta agar semua orang yang pernah kontak dengan yang bersangkutan agar melakukan karantina mandiri, dan kalau terasa gejala korona, agar segera ke puskesmas”.

Kemudian ditanyakan lagi:

Pertanyaan: Apakah setelah kontak dengan penderita covid 19, anda melakukan karantina mandiri? Di mana! Mengapa anda melakukannya (takut sama petugas atau kesadaran sendiri?

Informan: Yahya Idris(wawancara 14 maret 2022) mengatakan:

‘Iya, di rumah sendiri, kesadaran diri dan sudah menjadi anjuran pemerintah, jika orang yang melakukan kontak dengan orang yang terkonfirmasi covid harus melakukan karantina mandiri.Juga saya takut kalau saya benar positif korona juga, keluarga saya juga ikut terkonfirmasi”.

Pertanyaan: Berapa lama anda melakukan karantina mandiri? Apa yang dilakukan selama karantina dan apa ada pengawasan dari pemerintah.

Informan: Yahya Idris(wawancara 14 maret 2022) mengatakan:

“Selama 14 hari, sesuai dengan aturan pemerintah.Selama karantina mandiri saya tidak pernah kemana-mana dan hanya berdiam diri di rumah, juga meminta kepada teman untuk tidak berkunjung ke rumah saya dulu. Kemudian pengawasan dari pemerintah juga ada yakni sekali-kali ada aparat desa ke rumah saya untuk mengecek apa saya merasakan gejala atau tidak. Dan ternyata sampai 14 hari saya tidak merasakan apa-apa”.

Dari pendapat informan tersebut dapat disimpulkan bahwa warga yang pernah melakukan kontak atau pernah berbicara dengan warga masyarakat yang dinyatakan

positif corona harus melakukan karantina mandiri, apakah itu di tempat yang disediakan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa atau di rumah sendiri dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam karantina, yakni tidak pergi keluar rumah dan tidak melakukan kontak atau komunikasi dengan orang-orang terdekat atau teman selama masa karantina.

4.6 SELF-ISOLATION/ISOLASI MANDIRI

Partisipasi masyarakat dalam bentuk isolasi mandiri merupakan salah bentuk dukungan warga masyarakat dalam membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona agar tidak menjangkiti semakin banyak masyarakat. Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat sebagai berikut.

Pertanyaan:Dimana tempat isolasi, warga masyarakat yang terinfeksi corona?

Mengapa

Informan: Sekcam Mootilango/gugus tugas (bapak Nurdin S. Djibu (Wawancara 1 maret 2022) mengatakan:

“Biasanya ada kalau di lihat dari segi kondisi berat langsung diisolasi di tingkat kabupaten dalam kalau ringan boleh ditangani oleh desa atau kecamatan dan di setiap posko itu sudah disiapkan karantina mandiri dan pembiayaannya juga langsung ditanggung pemerintah desa”.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal yang sama kepala desa, yaitu:

Informan: KEPALA DESA HUYULA (BAPAK IRMAN NASIR, 10 Maret 2022) mengatakan:

‘Warga yang terkonfirmasi di desa huyula ini sudah ada dua orang tapi karantina di rumah masing-masing di bawah pengawasan satuan tugas desa, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan’

Informan: KEPALA DESA SATRIA (BAPAK SUNARDI, 8 Maret 2022)

mengatakan:

‘Hanya di rumah sendiri, tetapi kalau masyarakat yang terkena virus dan melakukan isolasi mandiri akan dibantu oleh pemerintah yakni diberikan makanan’

Informan: KEPALA DESA PARIS (BAPAK AGUS DAWALI, S.KOM, 7 Maret

2022) mengatakan:

‘Kami menyediakan tempat isolasi untuk warga yang terinfeksi di ruang PKK, kami sudah sterilkan untuk isolasi terpusat untuk warga desa paris yang terpapar korona’

Peneliti selanjutnya menanyakan kepada informan warga yang pernah melaksanakan isolasi mandiri ketika terinfeksi virus korona sebagai berikut.

Pertanyaan: Kapan anda terinfeksi Covid 19, dan apakah anda langsung melakukan isolasi mandiri? Mengapa?

Informan: Sri Mudiati Otto (wawancara 15 maret 2022) mengatakan:

“Tanggal 27 juli 2020 saya terkonfirmasi covid 19 dan langsung diminta untuk melakukan isolasi mandiri, dan saya memilih melakukan isolasi mandiri di rumah saja supaya lebih efektif, karena kalau saya isolasi di tempat isolasi yang disediakan pemerintah desa atau kecamatan dengan pasien lain, saya takut akan lama sembuh karena saling terinfeksi dengan pasien lain”.

Peneliti kembali menanyakan sebagai berikut.

Pertanyaan: Bagaimana dan dimana anda melakukan isolasi mandiri? Mengapa

Informan: Sri Mudiati Otto (wawancara 15 maret 2022) mengatakan:

“Saya melakukan isolasi mandiri di rumah saja, karena pas pada saat itu saya dalam keadaan hamil jadi tidak melakukan isolasi mandiri, baik pada tempat yang disediakan oleh pemerintah desa dan tempat isolasi mandiri lainnya. Pas kebetulan pada waktu itu saya hanya mengalami gejala ringan dan saya juga agak berat kalau dirawat di rumah sakit karena jaraknya agak jauh”.

Depat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan mootilango dan pemerintah desa telah menyiapkan tempat khusus untuk warga yang terinfeksi virus covid 19. Tempat isolasi tersebut dikhususkan untuk warga yang dinyatakan positif covid tapi hanya gejala ringan dan warga tersebut tidak mau dirawat di rumah sakit. Warga yang terinfeksi kebanyakan memilih untuk isolasi di rumah karena dirasa lebih efektif dan ada yang menjaga dari dekat.

Untuk warga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah tentunya akan diberikan kompensasi oleh pemerintah kecamatan mootilango, karena yang bersangkutan tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi untuk keluarganya. Kompensasi juga diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak dapat bekerja karena mereka harus menjaga dan merawat anggota keluarga mereka yang harus menjalani karantina atau isolasi mandiri di rumah yang berakibat mereka tidak dapat merawat diri mereka sendiri. Pemberian kompensasi tersebut diberikan pemerintah kecamatan karena warga masyarakat tersebut dianggap telah mendukung program pemerintah untuk pencegahan wabah virus koronan dalam bentuk ikut berpartisipasi melakukan isolasi mandiri. Berikut ditampilkan data tentang jumlah warga masyarakat kecamatan mootilango yang melakukan isolasi mandiri.

DATA PASIEN KONFIRMASI COVID-19 KECAMATAN MOOTILANGO

AGUSTUS 2020

NO.	NAMA	ISOLASI	KETERANGAN
1	NITH	Mandiri	Sembuh
2	LGYM	Mandiri	Meninggal
3	SIMO	Mandiri	Sembuh
4	FISP	Mandiri	Sembuh
5	DNZB	Mandiri	Sembuh
6	NYPW	Mandiri	Sembuh
7	JFKV	Mandiri	Sembuh
8	KMSO	Mandiri	Sembuh
9	MYMB	Mandiri	Sembuh
10	SRVI	Mandiri	Sembuh
11	KRKK	Mandiri	Sembuh
12	NNKM	Mandiri	Sembuh
13	SPRH	Mandiri	Sembuh
14	MMRZH	Mandiri	Sembuh

DATA PASIEN KONFRIMASI COVID-19 KECAMATAN MOOTILANGO

AGUSTUS 2021

NO.	NAMA	ISOLASI	KETERANGAN
1	Saiful usman	Mandiri	Sembuh
2	Nurain dehi	RS Ainun lanjut mandiri	Sembuh
3	Ara latif	RS Ainun lanjut mandiri	Sembuh
4	Elan R saleh	mandiri	Sembuh
5	Rahmi ayu effendi	mandiri	Sembuh
6	Ismail hasan	mandiri	Sembuh
7	Fatma mustapa	mandiri	Sembuh
8	Ending R Mahmud	mandiri	Sembuh
9	Indramayu pakaya	mandiri	Sembuh
10	Adi ma'ruf	mandiri	Meninggal
11	Irwanto	mandiri	Sembuh
12	Yakob karim	RSAS	Meninggal
13	Wartin saleh	mandiri	Sembuh
14	Prisaldi pirus	mandiri	Sembuh
15	Ramlah ngabito	mandiri	Sembuh
16	Santi J nur	mandiri	Sembuh

17	Siskawati moha	mandiri	Sembuh
18	Asriyanto busura	mandiri	Sembuh
19	Meilan poha	mandiri	Sembuh
20	Bayi Meilan poha	mandiri	Sembuh
21	Neni suleman	mandiri	Sembuh
22	Tamrin djuma	RSUD Boliyohuto	Meninggal
23	Mariana djafar	mandiri	Sembuh
24	Tiyan juma	mandiri	Sembuh

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat sebagai berikut.

Pertanyaan: Apakah ada tindakan khusus dari pemerintah kepada penderita korona yang isolasi mandiri dan keluarganya? Berupa apa

Informan: Sekcam Mootilango (bapak Nurdin S. Djibu (Wawancara 1 maret 2022) mengatakan:

“Biasanya tersangkut dengan pemberian vitamin, atau berupa pemberian makanan tambahan, barangkali di setiap desa itu ada program penuntasan corona disana ada dana untuk, itu bagi keluarga yang terkena atau tidak terkena corona sudah ada pendanaan berupa bantuan beras, telur, minyak goreng itu dilakukan oleh pemerintah desa, setiap desa yang ada di kecamatan mootilango sudah menyiapkan itu khusus untuk jaga-jaga jangan sampai terjadi, sudah ada pos yang diambil untuk pembiayaannya bagi terdampak, baik keluarga yang terdampak langsung maupun tidak”.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal yang sama kepala desa, yaitu:

Informan: KEPALA DESA HUYULA (BAPAK IRMAN NASIR, 10 Maret 2022)

mengatakan:

‘Ada, kami langsung mendatangi keluarga dan juga memberikan bantuan sembako kepada penderita korona agar nantinya dalam masa isolasi mereka terpenuhi kebutuhannya’

Informan: KEPALA DESA SATRIA (BAPAK SUNARDI, 8 Maret 2022)

mengatakan:

‘Ada seperti bantuan-bantuan’

Informan: KEPALA DESA PARIS (BAPAK AGUS DAWALI, S.KOM, 7 Maret 2022) mengatakan:

‘iya ada tindakan khusus, yakni kami berikan kebutuhan mereka yakni terutama bahan pangan, juga kami beri vitamin untuk mereka agar cepat melakukan pemulihan korona dan untuk keluarganya kami berikan juga berupa sembako terutama orang yang terpapar yang tidak bisa mencari nafkah kami bantu mereka dengan memberikan sembako’.

Kemudian peneliti menanyakan kepada warga yang pernah melaksanakan isolasi mandiri ketika terinfeksi virus korona sebagai berikut.

Pertanyaan:Apakah selama isolasi mandiri, anda tidak melakukan kontak dengan orang lain? Mengapa

Informan: Sri Mudiati Otto (wawancara 15 maret 2022) mengatakan:

“Kalau kontak dengan orang, tidak ada, paling dengan orang terdekat.Orang terdekat itu Cuma keluarga terdekat yakni suami sama anak, mereka diisolasi karena pada saat itu sama-sama berada di dalam rumah”.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, yakni:

Pertanyaan: Apakah ada penanganan khusus dari tenaga medis puskesmas kecamatan mootilango terhadap orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah?

Informan: Sri Mudiati Otto (wawancara 15 maret 2022) mengatakan:

“Iya ada, penanganan khusus itu, ialah setelah diketahui ada warga yang terkonfirmasi covid 19, besoknya itu tenaga medis dari puskesmas kecamatan mootilango datang ke rumah dan dilakukan pengecekan kesehatan baik itu suhu tubuh ataupun ada gejala-gejala yang dirasakan pada saat melakukan isolasi mandiri. Dari pemerintah kecamatan juga ada yakni berupa kebutuhan sembako sehari-hari”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan mootilango memberikan kompensasi berupa pemenuhan sembako kepada warga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Pemerintah kecamatan juga memberikan vitamin kepada warga yang terinfeksi agar daya tahan tubuh meningkat. Pemberian kompensasi kepada warga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri karena warga tersebut dianggap telah mendukung upaya pemerintah kecamatan dalam mencegah penyebaran virus yang berbahaya yakni virus korona.

4.7 SUMBANGAN MATERI DAN TENAGA

Partisipasi masyarakat sangat penting sekali mulai dari tingkat RT/RW sampai tingkat desa dan kelurahan untuk memantau orang apakah ada yang bepergian keluar kota, membantu pemerintah kecamatan untuk mencegah kumpul-kumpul, serta mendata warga masyarakat yang dalam kategori orang dalam pengawasan covid 19. Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat sebagai berikut.

Pertanyaan: Apakah anda pernah ikut menyumbangkan alat pelindung diri (APD) atau yang lain kepada tenaga medis? Mengapa

Informan: AGUS SALIHI (warga masyarakat, wawancara 13 maret 2022) mengatakan:

“Kalau saya pribadi belum pernah, Cuma saya menyarankan untuk seluruh tenaga medis ikut program pemerintah dengan menggunakan alat pelindung diri dan warga sebaiknya menggunakan masker. Tapi saya pernah membantu membagikan masker yang dibagikan pemerintah kecamatan di sekitar rumah saya”.

Partisipasi masyarakat melalui materi dan tenaga dalam pencegahan penyebaran korona sangat tergantung dari keadaan individu masyarakat. Warga masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, biasanya mereka berpartisipasi dalam bentuk materi, seperti dana untuk pembelian peralatan atau kebutuhan pokok warga yang sedang melakukan karantina atau isolasi mandiri. Adapun warga yang kurang dari aspek ekonomi, mereka biasanya berpartisipasi dalam bentuk tenaga, seperti ikut membantu warga atau pemerintah dalam membagikan masker, membantu menyediakan tempat untuk cuci tangan, membantu membersihkan lingkungan sekitar, membantu penyemprotan disinfektan, dan lain-lain. Hasil wawancara dengan informan yakni.

Pertanyaan: Apakah di sekitar tempat tinggal saudara, pernah dilakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri? Mengapa

Informan: AGUS SALIHI (warga masyarakat, wawancara 13 maret 2022) mengatakan:

“Iya pernah dan saya juga ikut dalam kegiatan tersebut beberapa kali, yakni ketika melakukan penyemprotan masjid dan rumah warga. Kami melakukan penyemprotan masjid karena merupakan tempat berkumpul orang untuk beribadah sehingga penting untuk menyemprotnya karena belum ada bantuan pemerintah waktu itu. Setelah ada bantuan dari pemerintah, kami melakukan penyemprotan di lingkungan sekitar dan rumah-rumah warga terutama rumah yang pemiliknya pernah isolasi mandiri”

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, pemerintah kecamatan mootilango dan gugus tugas melakukan tiga upaya untuk mencegah penyebaran korona, yakni meminta warga untuk mematuhi protokol kesehatan, melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah penduduk, tempat ibadah, perkantoran, dan tempat berkumpul orang seperti pasar, serta melakukan vaksin korona kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat sebagai berikut.

Pertanyaan: Apa upaya pemerintah untuk mencegah perkembangan korona?

Informan: Sekcam Mootilango/gugus tugas (bapak Nurdin S. Djibu (Wawancara 1 maret 2022) mengatakan:

“Biasanya selalu melakukan edukasi terutama misalnya memberikan pengumuman-pengumuman di masjid-masjid, sekolah-sekolah untuk melakukan protokol kesehatan, menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, sekarang sudah ada enam M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari mobilitas yang dilakukan oleh gugus covid maupun oleh pemerintah, baik kepala desa dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, tak hentinya-hentinya memberikan inovasi agar dalam mencegah penyebaran virus korona mentaati prokes, yang kedua setiap bangunan pemerintah, rumah, tempat ibadah disemprot dengan disinfektan, itu yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Di setiap rumah harus ada tempat cuci tangan dan juga pemerintah dan juga pemerintah membagikan masker secara gratis kepada seluruh warga masyarakat yang ada di sepuhuh desa yang ada”.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal yang sama kepala kepala desa, yaitu:

Informan: KEPALA DESA HUYULA (BAPAK IRMAN NASIR, 10 Maret 2022) mengatakan:

‘Untuk saat ini bagaimana target vaksin tercapai dan disisi lain juga selalu memantau kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan mengadakan sosialisasi, termasuk mensosialisaikan vaksin kepada masyarakat dalam

penanganan korona dan mudah-mudah desa huyula ini sudah 96% warga sudah divaksin sehingga kedepan korona ini tidak lagi berbahaya bagi masyarakat karena sudah divaksin’.

Informan: KEPALA DESA SATRIA (BAPAK SUNARDI, 8 Maret 2022)
mengatakan:

‘Yang sekarang lagi adalah pemberian vaksi dan tetap memakai masker dan menjaga jarak serta selalu mencuci tangan’.

Informan: KEPALA DESA PARIS (BAPAK AGUS DAWALI, S.KOM, 7 Maret 2022) mengatakan:

‘Upaya kami ialah menghimbau warga untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga terutama adalah melaksanakan gebyar vaksin pada seluruh masyarakat dan diharapkan yang sudah wajib vaksin dari umur 6 sampai lansia kami himbau atau selaku pemerintah kami sering mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk divaksin. Ini adalah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran covid 19’.

Berdasarkan jawaban informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa warga masyarakat cukup memiliki kemauan untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran virus korona dengan cara mematuhi semua protokol kesehatan dan ikut melakukan kegiatan sosial seperti melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat-tempat ibadah, rumah dan tempat yang sering dikunjungi warga, seperti pasar dan lain-lain. Warga juga membantu pemerintah membagikan masker secara gratis kepada warga di sekitar mereka, dan membantu menyediakan tempat cuci tangan.

Peneliti selanjutnya menanyakan kepada informan masyarakat sebagai berikut.

Pertanyaan: Apakah anda pernah ikut serta dalam kegiatan untuk mencegah penyebaran virus korona? Mengapa

Informan: AGUS SALIHI (warga masyarakat, wawancara 13 maret 2022)

mengatakan:

“Iya, seperti ikut penyemprotan di rumah-rumah ibadah, juga rumah warga dan kerja social seperti membagikan masker.Saya melakukan itu karena saya sudah pernah melihat ada warga sekitar terinfeksi virus korona, warga panik dan merasa takut terinfeksi sehingga warga yang terinfeksi tersebut dikucilkan”.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan mootilango dalam mencegah penyebaran virus koronan agar tidak menyebar luas dan menjangkiti sebagian besar masyarakat, tidak akan sukses tanpa bantuan dari masyarakat melalui partisipasi, karena hanya dengan partisipasi masyarakat, semua program pememrintah kecamatan akan terlaksnana dengan karena warga masyarakat yang merupakan sasaran utama dari berbagai kebijakan penvcegahan virus korona yang dikeluarkan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Hasil wawancara dengan informan dapat dapat dilihat sebagai berikut.

Pertanyaan: Apakah ada upaya pemerintah kecamatan untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pencegahan korona? Berupa apa

Informan: Sekcam Mootilango (bapak Nurdin S. Djibu (Wawancara 1 maret 2022) mengatakan:

“Tidak hentinya-hentinya masyarakat itu diajak secara sukaela untuk mematuhi protokol kesehatan dan melakukan isolasi mandiri kalau terinfeksi korona, agar pmutusan penyebaran korona bisa terwujud. Adapun partisipasi masyarakat bentuknya secara sukarela ikut vaksinasi korona mulai dosis dua sampai dosis tiga, ditambah dengan peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 menjadi acuan bagi kami mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan virus korona”.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal yang sama kepala kepala desa, yaitu:

Informan: KEPALA DESA HUYULA (BAPAK IRMAN NASIR, 10 Maret 2022)

mengatakan:

‘Ada bahkan door to door ke rumah-rumah untuk pencegahan korona dan mensosialisasikan bahayanya dan bagaimana upaya pemerintah desa agar masyarakat tidak terkonfirmasi korona dan ini kami lakukan bahkan hampir setiap bulan bila ketemu dengan pelanggar prokes dan sebagainya kami langsung memberikan teguran’

Informan: KEPALA DESA SATRIA (BAPAK SUNARDI, 8 Maret 2022)

mengatakan:

‘Ada kebanyakan pemerintah desa dan kecamatan mengedukasi dan mengsosialisasikan kepada warga masyarakat tentang bahaya penyakit korona ini’.

Informan: KEPALA DESA PARIS (BAPAK AGUS DAWALI, S.KOM, 7 Maret

2022) mengatakan:

‘Kami selaku pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, PHBS terutama, tetap menjaga kebersihan lingkungan dan juga terutama lingkungan masing-masing agar dibersihkan, kemudian juga tetap kami mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal kegiatan vaksinasi’.

Peneliti selanjutnya menanyakan kepada informan masyarakat sebagai berikut.

Pertanyaan: Apakah tokoh agama dan tokoh masyarakat aktif memberi seruan kepada warga masyarakat mengikuti imbauan pemerintah, seperti tetap di rumah dan untuk sementara waktu menyelenggarakan ibadah di rumah? Bagaimana bentuknya

Informan: AGUS SALIHI (warga masyarakat, wawancara 13 maret 2022)

mengatakan:

“Iya, seperti menghimbau untuk tidak ada kerumunan, dan mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga jarak dan untuk tidak selamanya untuk berkumpul. Biasanya imbauan tersebut dilakukan melalui pengeras suara

masjid atau apabila ada hajatan di rumah warga agar tetap menjaga jarak agar kegiatan hajatan tersebut tidak dibubarkan oleh gugua tugas korona”.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan mootilango dan pememrintah desa telah untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pencegahan korona, seperti mematuhi protokol kesehatan, menahan diri untuk tidak bepergian untuk urusan yangtidak terlalu penting, melakukan pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, melakukan penyemprotan disinfektan, serta mengajak keluarga untuk melakukan vaksibasi korona.

Dapat dikatakan bahwa penerapan protokol kesehatan dan membatasi warga untuk tidak bepergian merupakan cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk menekan cepatnya penyebaran virus korona. Hal ini tentunya tidaklah mudah karena kegiatan yang dituntut dalam protokol kesehatan merupakan aktivitas yang tidak biasanya dilakukan oleh masyarakat seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan jaga jarak, apalagi ditambah dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan warga masyarakat mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Inilah yang menyebabkan banyak warga yang kurang mematuhi ketentuan tersebut. Pada hari Selasa 17 Mei 2022 Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan lepas masker di tempat umum, dimana kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang tengah beraktivitas di luar ruangan saja untuk kategori, dan syarat orang yang boleh tidak memakai masker. Sementara itu masih wajib menggunakan masker bagi orang yang beraktivitas di dalam ruangan dan transportasi umum.Di samping itu, banyaknya pelanggaran

protokol kesehatan juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya virus korona sehingga sebagian masyarakat menganggap remeh virus korona. Hasil penelitian yang dikutip dari (Zuleha: 2021:108) menemukan bahwa kurangnya disiplin masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan disebabkan oleh faktor-faktor seperti pendidikan yang rendah, pemahaman masyarakat yang rendah dan meremehkan covid19, dan faktor internal, seperti percaya pada takdir tanpa menjaga diri atau berusaha menjaga kesehatan. Berbagai faktor antara lain tekanan ekonomi, faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah, lemahnya upaya hukum, dan sanksi terhadap pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, yakni: Dalam penanganan covid 19, pemerintah kecamatan Mootilango menitikberatkan pada kepatuhan protokol kesehatan dengan cara menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya covid 19. Adapun partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 sudah berjalan cukup baik. Warga masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam melakukan karantina mandiri apabila habis kontak dengan warga yang terinfeksi covid 19 dan melakukan isolasi mandiri apabila dinyatakan positif covid 19 dengan gejala ringan. Demikian halnya dengan partisipasi dalam bentuk tenaga, masyarakat ikut membantu pemerintah membagikan masker gratis kepada masyarakat, menyediakan tempat cuci tangan, dan melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat-tempat berkumpul warga. Walaupun pemerintah memperbolehkan lepas masker di tempat umum, namun kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang tengah beraktivitas di luar ruangan saja untuk kategori, dan syarat orang yang boleh tidak memakai masker. Sementara itu masih wajib menggunakan masker bagi orang yang beraktivitas di dalam ruangan dan transportasi umum.

5.2 SARAN

Karena masih banyak yang belum paham mengenai bahaya virus koronan, maka sebaiknya pemerintah kecamatan Mootilango lebih aktif lagi untuk memberikan sosialisasi secara besar-besaran yaitu sosialisasi mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga dan desa dalam wilayah kecamatan Mootilango. Pemerintah juga harus lebih aktif bekerja sama dengan para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama untuk selalu memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk lebih tertib pada aturan protokol kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Edi suharto. 2017. Kebijakansosial sebagai kebijakan public. Diterbitkan Alfabeta. Bandung.
- Darmin tuwu, dkk. 2021. Dinamika kebijakan penanganan pandemic covid-19 dalam perspektif kesejahteraan sosial. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 10, No 02 (2021): hal 97 – 110
- Ginangjar kartasasmita. 2007. Pembangunan untuk rakyat memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Penerbit Pustaka cidesindo. Jakarta
- Mohammad mulyadi. 2020. Partisipasi masyarakat dalam penanganan penyebaran covid-19. Pusat penelitian badan keahlian DPR RI. Info singkat, vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.
- Khairuddin. 2018. Pembangunan masyarakat. Diterbitkan Gramedia. Jakarta.
- Kustiningsih, W., & Nurhadi.(2020). Penguatan Modal Sosial dalam Mitigasi COVID-19. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal (pp. 179–193). Gadjah Mada University Press.
- Slamet, Y. 2018. Pembangunan masyarakat berwawasan partisipatif. Diterbitkan oleh sebelas maret university press. Surakarta.
- Solichin abdul wahab. 2018), *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Edisi Kedua). Diterbitkan Bumi karsa. Jakarta.
- Yudan hermawan dan akhmad rofiq.(2020). partisipasi masyarakat dalam pencegahan covid-19. Journal of nonformal education and community empowerment. Volume 4 (1): 17-22. Juni 2020.
- Vegi lestari dan adhiputro pangarso wicaksono (2021). Edukasi protokol kesehatan di masa pandemi covid - 19 pada warga dk. berdug kulon rt 01 rw 11, sidomulyo, ampel, boyolali. Intelektiva : Jurnal ekonomi, sosial & humaniora. E-ISSN 2686 5661 VOL.2 NO. 09 - APRIL 2021

Zuleha (2021).Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan virus corona di tinjau dari peraturan walikota langsa. Samudra Keadilan E-ISSN : 2615-7845 Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2021

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

WARGA MASYARAKAT (biasa/tidak terkena virus) (AGUS SALIHI, wawancara 13 maret 2022)

Patuh social-physical distancing

1. Menurut anda apakah langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus korona oleh pemerintah kecamatan dan gugus tugas, sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku? Beri alasan anda
2. Apakah anda pernah melanggar, dan apakah diberi sanksi (teguran, kerja sosial, denda 150 ribu?
3. Pernahkah anda melanggar aturan sosial distancing? Berapa kali, dan mengapa?
4. Apakah anda mendukung semua program pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 di kabupaten gorontalo? Mengapa ?

Sumbangan Materi dan Tenaga

5. Apakah anda pernah ikut menyumbangkan alat pelindung diri (APD) atau yang lain kepada tenaga medis? Mengapa
6. Apakah di sekitar tempat tinggal saudara, pernah dilakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri? Mengapa
7. Apakah anda pernah ikut serta dalam kegiatan untuk mencegah penyebaran virus korona? Mengapa
8. Apakah tokoh agama dan tokoh masyarakat aktif memberi seruan kepada warga masyarakat mengikuti himbauan pemerintah, seperti tetap di rumah dan untuk sementara waktu menyelenggarakan ibadah di rumah? Bagaimana bentuknya

WARGA MASYARAKAT

Self-quarantine/karantina mandiri

Yahya Idris (wawancara 14 maret 2022)

1. Menurut anda, apakah dan bagaimana pemerintah kecamatan menyediakan tempat khusus untuk karantina mandiri? Apa perlu?
2. Pernahkah anda melakukan kontak dengan penderita covid 19? Mengapa!
3. Apakah setelah kontak dengan penderita covid 19, anda melakukan karantina mandiri? Di mana! Mengapa anda melakukannya (takut sama petugas atau kesadaran sendiri?)
4. Berapa lama anda melakukan karantina mandiri? Apa yang dilakukan selama karantina dan apa ada pengawasan dari pemerintah

WARGA MASYARAKAT (terinfeksi)

Self-isolation

Sri Mudiati Otto (wawancara 15 maret 2022)

9. Kapan anda terinfeksi Covid 19, dan apakah anda langsung melakukan isolasi mandiri? Mengapa?
10. Bagaimana dan dimana anda melakukan isolasi mandiri? Mengapa
11. Apakah selama isolasi mandiri, anda tidak melakukan kontak dengan orang lain? Mengapa mereka diisolasi karena pada saat itu sama-sama beradadi dalam rumah
12. Apakah ada penanganan khusus dari tenaga medis puskesmas kecamatan mootilango terhadap orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah?

WAWANCARA

CAMAT/KEPALA DESA

1. Langkah-langkah apa yang pemerintah tempuh untuk mencegah dan mengendalikan virus korona?
2. Apakah masyarakat yang melanggar diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku? Mengapa!

3. Apakah pemerintah kecamatan dan desa menyediakan tempat khusus untuk masyarakat melakukan karantina mandiri? Mengapa?
4. Apa yang dilakukan jika ada masyarakat yang melakukan kontak dengan penderita korona, namun tidak mau melakukan karantina mandiri?
5. Dimana tempat isolasi, warga masyarakat yang terinfeksi korona? Mengapa
6. Apakah ada tindakan khusus dari pemerintah kepada penderita korona dan keluarganya? Berupa apa ?
7. Apa upaya pemerintah untuk mencegah perkembangan korona?
8. Apakah ada upaya pemerintah kecamatan untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pencegahan korona? Berupa apa?

DOKUMENTASI WAWANCARA



SEKCAM/KETUA GUGUS TUGAS (NURDIN S. DJIBU, 1 MARET 2022)



KEPALA DESA PARIS (WAWANCARA 7 MARET 2022)



Informan: IRMAN NASIR (KEPALA DESA HUYULA (WAWANCARA 10 MARET 2022))



KEPALA DESA SATRIA (WAWANCARA 8 MARET 2022)



WARAGA TERINFEKSI (WAWANCARA 8 MARET 2022)



WARGA YANG TIDAK TERINFEKSI VIRUS KORONA (10 MARET 2022)



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. ACHMAD A. WAHAB NO 65 TELP. 0435 (881060)
LIMBOTO

REKOMENDASI

Nomor : 074 /BKBP/ 39 /II/2022

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Icshan Gorontalo Nomor : 3733/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022 tanggal 25 November 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a : AJON LUKUM
NIM : S2118050
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Huyula Kec. Mootilango Kab. Gorontalo
Maksud : Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
Judul Penelitian : "Partisipasi Masyarakat dalam Membantu Pemerintah Kecamatan Mootilango dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gorontalo"
Lokasi Penelitian : Kecamatan Mootilango Kab. Gorontalo
Waktu Penelitian : Tanggal 9 Februari s/d 9 April 2022

Dalam melakukan kegiatan agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Kepala Badan/Dinas terkait.

Demikian Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan selesai mengadakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Gorontalo Cq. Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo.

DIKELUARKAN DI : LIMBOTO
PADA TANGGAL : 9 FEBRUARI 2022

An. KEPALA BADAN
Ub. KABID EKONOMI SOSIAL BUDAYA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

YUYUN NURUL AINI, SKM, MPH.

PEMBINA

NIP. 19650522 198502 2 002

Tembusan

1. Yth, Bupati Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth, Wakil Bupati Gorontalo (sebagai laporan)
3. Yth, Camat Mootilango Kab. Gorontalo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3733/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ajon Lukum
NIM : S2118050
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN MOOTILANGO
Judul Penelitian : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENAGANAN
COVID-19 DI KECAMATAN MOOTILANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 25 November 2021

Ketua,


Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 089/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : AJON LUKUM
NIM : S2118050
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Pemerintah
Kecamatan Mootilango Dalam Penanganan Covid 19 Di
Kabupaten Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **6%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Gorontalo, 25 Mei 2022
Tim Verifikasi,

Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

6% Overall Similarity

<1%

Top sources found in the following databases:

- 6% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	es.scribd.com	Internet	1%
2	blogaldirinaldi.wordpress.com	Internet	
3	berkas.dpr.go.id	Internet	<1%
4	repository.uinbanten.ac.id	Internet	<1%
5	123dok.com	Internet	<1%
6	statik.unesa.ac.id	Internet	<1%
7	ejournal.unp.ac.id	Internet	<1%

8	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id	Internet	<1%
9	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
10	elisa1.ugm.ac.id	Internet	<1%
11	text-id.123dok.com	Internet	<1%
12	ejournal.unsrat.ac.id	Internet	<1%

ABSTRACT

AJON LUKUM. S2118050. THE COMMUNITY PARTICIPATION IN HELPING THE MOOTILANGO SUBDISTRICT GOVERNMENT IN HANDLING COVID 19 IN GORONTALO DISTRICT

This study aims to find out the community participation in helping the Mootilango Subdistrict government in handling Covid 19 in Gorontalo District. This study uses a descriptive qualitative research method to describe the object or social setting of this study in narrative presentation. The informants in this study cover the Mootilango Subdistrict head, the Mootilango Subdistrict task force (1 person), the village heads (three people), and community members who live in the area. The results of the study show that community participation in helping the Mootilango Subdistrict government in handling Covid 19 has been quite well. The community has participated in self-quarantining if they have had contact with people infected with COVID-19 and self-isolating if they are declared positive for COVID-19 with mild symptoms. Likewise, with participation in the form of contribution, the community helps the government distribute free masks to the community, provides some places for washing hands, and sprays disinfectants at places where people gather, such as mosques, offices, houses, and other places. Community participation is still low, namely implementing health protocols such as wearing masks when leaving the home, washing hands and keeping a distance from other people. The reason people do not comply with health protocols is to feel weird about all these activities carried out by the community.

Keywords: community participation, covid 19 handling, subdistrict government



ABSTRAK

AJON LUKUM. S2118050. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PEMERINTAH KECAMATAN MOOTILANGO DALAM PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk bagaimana kemudian mendeskripsikan suatu objek atau setting social suatu tulisan yang kemudian sifatnya naratif. Informan dalam penelitian ini adalah camat Mootilango, gugus tugas kecamatan Mootilango (1 orang), kepala desa (tiga orang) dan warga masyarakat yang bertempat tinggal di area lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kecamatan mootilango dalam penanganan covid 19 sudah berjalan cukup baik. Warga masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam melakukan karantina mandiri apabila habis kontak dengan warga yang terinfeksi covid 19 dan melakukan isolasi mandiri apabila dinyatakan positif covid 19 dengan gejala ringan. Demikian halnya dengan partisipasi dalam bentuk tenaga, masyarakat ikut membantu pemerintah membagikan masker gratis kepada masyarakat, menyediakan tempat cuci tangan, dan melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat-tempat berkumpul warga seperti masjid, perkantoran, rumah penduduk, dan tempat lainnya. Partisipasi masyarakat yang masih rendah yakni melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker kalau keluar rumah, selalu mencuci tangan, jaga jarak dengan wargalain. Alasan warga mengapa mereka kurang mematuhi protokol kesehatan karena semua kegiatan tersebut belum terbiasa dilakukan masyarakat.



Kata kunci : partisipasi masyarakat, penanganan covid 19, pemerintah kecamatan

CURICULUM VITAE

Nama : Ajon Lukum
NIM : S2118050
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 03 Desember 1999
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Nama Orang Tua

Ayah : Rum Lukum
Ibu : Asna P. Abas

Saudara Kandung

Kakak : Herman Lukum

Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket.
1.	2004 - 2010	MIS AL - MUNAWWARAH	Kec. Mootilango	Berijazah
2.	2010 - 2013	MTs AN - NUR	Kec. Mootilango	Berijazah
3.	2013 - 2017	SMAN 1 BOLIYOHUTO	Kec. Boliyohuto	Berijazah

